# BAB I

# PENDAHULUAN

## Bagian ini bertujuan untuk menyajikan konteks komprehensif yang melandasi pelaksanaan penelitian ini. Di dalamnya, akan diuraikan secara mendalam mengenai permasalahan inti yang menjadi fokus studi, relevansi topik dalam disiplin ilmu terkait, serta urgensi dan signifikansi dilakukannya investigasi ini. Penjelasan ini esensial untuk membangun pemahaman yang kokoh mengenai dasar pemikiran di balik perumusan tujuan penelitian dan pemilihan metodologi yang diterapkan.

Peranan infrastruktur memiliki peranan esensial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ketersediaan infrastruktur yang memadai ini berkontribusi pada peningkatan akses masyarakat terhadap beragam sumber daya, sehingga mengoptimalkan produktivitas dan pada akhirnya memicu pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap infrastruktur seyogianya tidak hanya berfokus pada aspek kuantitas, melainkan juga pada kualitasnya. Dalam konteks ini, Taddoro (2006) menyoroti bahwa perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang kerap terhambat oleh kondisi infrastruktur yang suboptimal. Faktanya, seringkali ditemukan bahwa proyek pembangunan infrastruktur justru menjadi beban finansial bagi suatu daerah, yang pada gilirannya menghambat laju perekonomian akibat kualitas konstruksi yang tidak memadai.

Ketersediaan infrastruktur yang belum memadai dalam realitasnya seringkali berkontribusi signifikan terhadap tingginya beban logistik dan rendahnya aliran investasi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur semestinya dipandang secara komprehensif dan dijadikan prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Sebagaimana diungkapkan oleh Taddoro, prasarana menunjukkan korelasi erat dengan kemajuan ekonomi suatu wilayah atau kawasan; area dengan infrastruktur yang lebih baik cenderung menikmati peningkatan kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat.

Penerapan konsep penetapan biaya (costing) memegang peranan krusial dalam konteks pengembangan infrastruktur. Langkah ini esensial guna memastikan bahwa alokasi anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif, sehingga mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan pemerintah. Dengan mengimplementasikan konsep costing, seluruh komponen biaya yang terkait dengan proyek, mulai dari investasi awal hingga operasional dan pemeliharaan jangka panjang, dapat diperhitungkan secara komprehensif dan akurat. Perhitungan yang cermat ini kemudian menjadi landasan objektif bagi para pengambil keputusan untuk mengevaluasi kelayakan pelaksanaan proyek infrastruktur tersebut.

Fenomena kegagalan fungsional pada proyek infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, seperti terbengkalai, tidak termanfaatkan secara optimal, atau mengalami kerusakan dini, seringkali disertai dengan penangkapan pejabat atau aparatur negara akibat praktik korupsi yang umumnya dipicu oleh penggelembungan anggaran. Kondisi ini menegaskan urgensi penerapan konsep perhitungan biaya atau instrumen akuntansi dalam konteks pembangunan infrastruktur. Sejalan dengan hal tersebut, sebuah studi terdahulu oleh Ahmad Fadri Kurnia Mubarok (2012), berjudul "Analisis Biaya-Manfaat dalam Proyek Infrastruktur Publik", menyoroti bahwa penggunaan Analisis Biaya-Manfaat (CBA) dalam pengambilan keputusan terkait infrastruktur publik memiliki implikasi yang komprehensif, mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari perspektif ekonomi, CBA berperan dalam menjamin alokasi sumber daya publik yang efisien guna menghasilkan manfaat optimal bagi masyarakat. Dalam ranah sosial, CBA memfasilitasi pemahaman mendalam mengenai dampak proyek terhadap isu kesetaraan, keadilan, serta tingkat partisipasi masyarakat. Sementara itu, dari dimensi lingkungan, CBA berkontribusi dalam mitigasi dampak proyek terhadap ekosistem dan

Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sangat membutuhkan infrastruktur dermaga yang memadai. Ketersediaan dermaga ini esensial untuk memfasilitasi konektivitas antarpulau, menopang berbagai kegiatan pembangunan, serta mengakselerasi aktivitas ekonomi. Hal ini menjadi krusial mengingat masih banyak wilayah kepulauan yang belum terjangkau oleh moda transportasi laut yang representatif, aman, lancar, dan terjamin keselamatannya, sehingga keberadaan dermaga dapat melancarkan perputaran perekonomian. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara aktif menggalakkan pembangunan infrastruktur dermaga. Inisiatif ini didasari oleh keyakinan bahwa keberadaan fasilitas dermaga akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di area sekitarnya serta meningkatkan interkonektivitas antar pulau-pulau di dalam wilayah terkait.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang secara geografis merupakan daerah kepulauan, terdiri atas 133 pulau, dengan 72 di antaranya berpenduduk. Pulau-pulau ini tersebar di empat kecamatan kepulauan, yakni Liukang Tupabbiring, Liukang Tupabbiring Utara, Liukang Kalmas, dan Liukang Tangaya, di mana 80% dari total luas wilayahnya merupakan perairan. Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan telah membangun sebanyak 57 unit dermaga kayu yang terdistribusi di 50 pulau. Namun, sebagian dari fasilitas tersebut tidak berfungsi secara optimal; beberapa di antaranya tidak dapat digunakan saat air surut karena kedangkalan, sementara yang lain mengalami kerusakan fisik. Berdasarkan data dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)—sebuah instrumen yang digunakan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep, untuk menghimpun informasi mengenai kerusakan atau kebutuhan pembangunan infrastruktur dermaga—diketahui bahwa rata-rata 15 unit dermaga diusulkan untuk direhabilitasi. Kendati demikian, tidak semua usulan tersebut dapat diakomodasi dalam anggaran Dinas Perhubungan mengingat keterbatasan plafon alokasi dana. Khusus pada tahun anggaran 2024, dari 15 unit dermaga yang diusulkan untuk direhabilitasi, 13 unit di antaranya berhasil direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Rincian jumlah dermaga yang diusulkan untuk rehabilitasi dan pembangunan melalui Musrenbang selama periode tiga tahun anggaran disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1  
Kondisi Proyek Pembangunan Saranа-Prasarana Kabupaten Pangakejene dan Kepulauaн Tаhun 2021-2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tahun | Jenis Proyek | | Total Anggaran | Keterangan |
| Rehab | Bangun Baru |  |
| 1 | 2021 | 15 | 8 | 3,850,000,000 |  |
| 2 | 2022 | 11 | 6 | 2,850,000,000 |  |
| 3 | 2023 | 13 | 4 | 2,750,000,000 |  |

Data yang disajikan berasal dari Dinas Perhubungan Kab Pangkep, sebagaimana tercatat dalam publikasi mereka pada tahun 2024.

Analisis terhadap data yang disajikan di atas mengindikasikan bahwa beberapa dermaga yang dibangun oleh Dinas Perhubungan berada dalam kondisi tidak layak operasional akibat kerusakan. Kondisi ini kontras dengan kebutuhan mendesak masyarakat akan fasilitas dermaga yang fungsional dan memadai. Dalam kerangka analisis ini, penelitian ini berupaya menginvestigasi secara mendalam data yang tersedia, menggunakan pendekatan akuntansi manajemen, guna mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap suboptimalitas pembangunan infrastruktur dermaga di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelusuran ini dilakukan melalui studi terhadap informasi yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024. Dari hasil observasi terhadap data anggaran tersebut, teridentifikasi bahwa formulasi anggaran dalam DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum sepenuhnya mengimplementasikan konsep \*Costing\*, melainkan lebih cenderung mengandalkan pendekatan estimasi, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1. 2   
Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pangakejene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Vol.** | **Anggaran** | **Realisasi** | **Selisih Anggaran** | **Keterangan** |
| **BELANJA MODAL** |  |  |  |  |  |
| 1. Pembangunan Dermaga P.Samatellu Lompo Mt.Walie | 1 paket | Rp 160,000,000 | Rp 158,490,000 | Rp 1,510,000 | Selisih terjadi karena pada saat penetapan harga satuan tiap komponen biaya pada realisasi belanja disesuaikan dengan harga yang berlaku dipasaraan saat itu. |
| 2. Pembangunan Dermaga Maccini Baji | 1 paket | Rp 150,000,000 | Rp 149,300,000 | Rp 700,000 |
| **BELANJA PEMELIHARAAN** |  |  |  |  |
| Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi |  |  |  |  |
| 1. Pemeliharaan Dermaga P.Saugi Mt.Baji | 1 paket | Rp 170,000,000 | Rp 169,520,000 | Rp 480,000 |
| 2. Pemeliharaan Dermaga P.Gondong Bali Mt.Matae | 1 paket | Rp 160,000,000 | Rp 158,080,000 | Rp 1,920,000 |

Tabel 1. 2 di atas menunjukkan bahwa, terdapat 2 (dua) peket kegiatan rehab dan kegiatan pembangunan dermaga dengan koefiesien/volume yang sama yaitu 1 paket namun harga masing-masing berbeda baik pada kegiatan pembangunan maupun kegiatan rehabilitasi Dermaga. Dalam konsep *costing* seharusnya koefisien/volume harus diuraikan secara detail sehingga setiap komponen biaya dapat dilihat volume dan harga satuannya.

Melihat kompleksitas fenomena yang telah dipaparkan, penulis tergerak untuk melakukan sebuah studi. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam “Analisis Implementasi Konsep Costing Kelayakan Pembangunan Infrastruktur Dermaga Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.”

## B. Rumusan Masalah

Merujuk pada konteks permasalahan yang telah dijelaskan dalam latar belakang, penelitian ini berfokus pada analisis implementasi konsep penentuan biaya dalam proyek konstruksi infrastruktur dermaga yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

## C. Objektif dari Kajian Ini

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip perhitungan biaya dalam kegiatan Pembangunan Infrastruktur Deramaga yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

## D. Manfaat Penelitian

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Karya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya wawasan, khususnya bagi penyusunnya, serta secara umum bagi khalayak pembaca.

1. Manfaat Praktis
2. Informasi yang disajikan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai landasan esensial bagi Pemerintah dalam merumuskan strategi dan kebijakan terkait pengelolaan serta pengembangan infrastruktur.
3. Mengembangkan wawasan serta pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip \*costing\*.

Mohon berikan teks yang ingin diparafrase. Teks yang Anda berikan kosong.